

Ery Seda

“Mainstream Gender ke Dalam Gerakan Filantropi!”

Sumber:

Judul buku : Kaum Perempuan dan Filantropi: Stereotip Lama, Tantangan-Tantangan Baru

Ditulis ulang dari : Jurnal Galang, Vol.2 No.2 April 2007, PIRAC, 2007, Opini, Hal 77 – 84

*Problematika perempuan di Indonesia dan kawasan Asia pada umumnya masih terkungkung dalam budaya patriarki. Kebijakan pemerintah yang lebih mengarusutamakan kepentingan perempuan belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Peran serta masyarakat, khususnya perempuan, dalam mendukung kegiatan organisasi masyarakat sipil/LSM dalam program pemberdayaan perempuan sangat diperlukan. Bagaimana potensi kedermawanan perempuan dan perannya dalam mendukung program perempuan, problematika perempuan saat ini, dan bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Berikut wawancara Galang dengan **Francisia SSE Seda** atau lebih dikenal dengan Ery Seda, Ketua Program Pasca Sarjana Departemen Sosiologi, FISIP UI.*

Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan masih mengalami ketertinggalan dalam beberapa bidang pembangunan. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Ketertinggalan dalam pembangunan itu antara lain karena faktor kultural dan struktural. Secara kultural, termasuk didalamnya nilai-nilai budaya dan agama, sangat kuat dengan ideologi patriarki. Dengan kata lain, paradigma pembangunan masih bersifat patriarkal. Kaum perempuan didomestikasikan; perempuan hanya dianggap berkiprah di ranah domestik. Sedangkan ranah publik lebih dianggap sebagai ranah kaum laki-laki. Pembangunan masih menganggap perempuan sebagai objek pelengkap dan bukan subjek. Secara struktural, seluruh struktur dan sistem yang ada di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, semuanya menganggap bahwa seharusnya laki-laki lebih mendapatkan akses dan kesempatan dibandingkan dengan perempuan. Jadi perbedaan lebih didasarkan pada gender daripada kemampuan. Secara kultural dan struktural perempuan dimarginalisasikan walaupun seringkali hal ini tidak disadari. Problematika ini sudah *build in* atau inheren di dalam masyarakat. Jadi, paradigma pembangunan masih berideologi developmentalis sehingga yang dipentingkan adalah hasil / *output* dan bukan proses.

Apakah kecenderungan tersebut berubah saat ini?

Tentu sudah ada perubahan. Misalnya, di dalam proses pembangunan masyarakat kita ada kebijakan *gender mainstreaming*, pengarusutamaan gender di dalam kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga perubahan nilai. Misalnya, sekarang banyak perempuan terutama kelas menengah ke atas di daerah perkotaan yang berkiprah sepenuhnya di ranah publik. Hanya saja perubahan nilai ini belum betul-betul secara sistematis dan struktural mengubah ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan secara struktural masih ada, walaupun ada kasus-kasus individual sebagai pengecualian. Namun, secara sistemik tetap saja masih ada perbedaan. Bukan berarti keadaan sekarang kondisinya relatif lebih baik. Tetapi kita tetap saja melihatnya sebagai akibat kebijakan pembangunan masa lalu, seperti kekerasan pada perempuan yang masih marak terjadi. Selain itu pengertian mengenai pornografi, pornoaksi, misalnya, secara kultural hal tersebut juga memperlihatkan bahwa yang dimarginalisasikan adalah perempuan .

Menurut Ibu, program-program apa yang bisa digagas untuk mengubah ketertinggalan tersebut?

Salah satunya adalah pengarusutamaan gender di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Contoh program lainnya adalah *gender mainstreaming*, *gender budgeting* (alokasi budget berdasarkan kepentingan perempuan dan laki-laki). Alokasi budget pemerintah ini dilakukan baik di pemerintah lokal, propinsi, maupun pusat. Kalau dari sisi masyarakat, contohnya adalah keaktifan dan keterlibatan civil society organization (CSO). Banyak dari mereka yang sudah aktif dalam proses pemberdayaan perempuan. Ada pula program-program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang memang fokusnya di bidang itu. Program-program ini relatif bisa membantu mengubah ketidaksetaraan. Program-program khusus untuk perempuan perlu untuk diadakan dalam rangka tindakan afirmatif yang tidak bersifat permanen melainkan sementara.

Program-program *mainstreaming* apa yang mendesak bagi perempuan saat ini untuk dilakukan?

Prioritas program yang mendesak dilakukan untuk perempuan adalah mengatasi kemiskinan. Proses feminisasi kemiskinan itu harus dicegah, bahkan harus dikurangi seminimal mungkin. Ini terutama untuk kaum perempuan di pedesaan dan perempaun yang termasuk dalam kaum miskin kota. Persoalan ini seharusnya menjadi fokus dari kebijakan pemerintah dan *civil society organization* (CSO) untuk mengupayakan agar kaum perempuan yang banyak tergolong di dalam kaum miskin bisa mendapatkan pemberdayaan. Model pemberdayaan yang dilakukan Muhammad Yunus dengan Grameen Banknya adalah contoh konkret. Jadi, peningkatan ekonomi merupakan pintu masuk yang pertama. Dengan meningkatnya kondisi ekonomi mereka, secara perlahan problem perempuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan membaik dengan meniadakan kemiskinan itu sendiri.

Ada beberapa LSM di Indonesia mempunyai perspektif yang berbeda tentang persoalan perempuan. Menurut Ibu bagaimana problematika perempuan itu sendiri?

Menurut saya, ada prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek perempuan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan praktisnya. Kebutuhan ini memfokuskan pada pengurangan kemiskinan, misalnya sandang, pangan, dan papan. Ini merupakan kebutuhan mendasar dari masyarakat, termasuk di dalamnya kaum perempuan. Sedangkan kebutuhan jangka panjangnya lebih pada kepentingan gender secara strategis. Program yang bisa digagas adalah kesadaran dari, oleh, dan untuk kaum perempuan mengenai posisi dan status perempuan di dalam masyarakat. Program yang bisa mengubah struktur dan kultur masyarakat yang meminggirkan kaum perempuan, misalnya, pendidikan kritis pada kaum perempuan dan laki-laki yang menyadarkan mengenai pentingnya kesetaraan gender.

Bagaimana dukungan masyarakat lewat kegiatan filantropi dapat berperan dalam menyediakan sumber daya guna mengatasi ketertinggalan perempuan tersebut?

Kegiatan filantropi dapat menyumbang bagi kelompok-kelompok sosial pada umumnya. Di dalamnya termasuk berbagai kelompok perempuan yang mempunyai program-program pembangunan yang berorientasi memberdayakan kaum perempuan; yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan strategis perempuan jangka panjang. Misalnya, pendidikan untuk kesadaran kritis kaum perempuan, pinjaman kredit mikro untuk membangun usaha kecil menengah yang diselenggarakan oleh dan untuk kaum perempuan, dll. Peran masyarakat melalui kegiatan *civil society organization*/LSM-nya bermacam-macam. LSM bidang politik ekonomi, keagamaan, kesehatan, sosial, pendidikan, semua bisa bersinergi dan berkoordinasi untuk membantu proses *gender mainstreaming*. Jadi tugas masyarakat dalam

hal ini LSM dan kelompok-kelompok masyarakat, ormas, semuanya mempunyai program yang bisa membantu memberdayakan kaum perempuan.

Secara sosiologis, mengapa masyarakat maupun lembaga sosial lebih cenderung menyumbang program-program yang sifatnya umum dibandingkan program-program yang secara khusus didedikasikan untuk kepentingan dan isu kaum perempuan?

Kecenderungan tersebut lebih disebabkan karena masyarakat dan lembaga-lembaga sosial masih beranggapan bahwa kaum perempuan tidak perlu diberikan perhatian secara khusus; mereka dianggap sama dengan kaum laki-laki. Selain itu masih ada perasaan mendua di kalangan masyarakat kita, baik laki-laki maupun perempuan mengenai persoalan gender ini. Menurut saya, gender merupakan hubungan yang dikonstruksikan secara sosial antara laki-laki dengan perempuan. Jadi gender bukan hanya membicarakan tentang perempuan saja. Relasi ini yang tidak setara, mulai dari individual sampai ke struktural. Sehingga, kalau ingin mengubah ketidaksetaraan relasi gender antara laki-laki dengan perempuan, mulai dari tataran individu, kelompok, sampai ke struktur masyarakat, maka perlu adanya perubahan di dalam nilai masyarakat. Nilai yang ingin dicapai adalah anggapan bahwa perempuan setara dengan laki-laki, dalam segala hal. Jika belum ada perubahan nilai itu, maka masyarakat akan selalu tetap gamang, ragu-ragu, dan tidak pasti terhadap program-program pemberdayaan perempuan. Masyarakat perlu melihat bahwa program ini penting. Jadi menurut saya, yang harus diubah itu bukan perempuan-perempuan, tetapi pola pikir masyarakatnya. Ini merupakan kultur dan program jangka panjang yang harus dilakukan bersama. Kultur yang harus diubah adalah bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan setara dalam berbagai level baik individual, kelompok, struktur dan dari ranah domestik dan ranah publik. Jika kultur tersebut sudah berubah, maka berbagai program pemberdayaan perempuan akan jauh lebih di-terima di masyarakat.

Kemudian, faktor-faktor apa saja yang membuat filantropi (kedermawanan sosial) dan pendayagunaan sumbangan sosial belum memperhatikan kepentingan dan isu-isu perempuan?

Pendayagunaan sumbangan belum memperhatikan kepentingan perempuan karena beberapa faktor. *Pertama*, perempuan dianggap sama dalam hal kepentingan dengan laki-laki sehingga tidak perlu diberikan perhatian secara khusus. Ideologi patriarki masih kuat di dalam filantropi sosial. Kegiatan-kegiatan filantropi dan kedermawanan sosial dipengaruhi oleh nilai dalam masyarakat, belum melihat perempuan sebagai fokus atau kelompok yang perlu dibantu dan diperdayakan. Jadi masyarakat masih melihat bahwa filantropi sosial bersifat umum. Bias-bias tersebut juga masih kuat di kalangan mereka yang melakukan filantropi sosial. *Kedua*, perempuan justru dianggap sudah cukup diperhatikan dan dijadikan prioritas sehingga tidak perlu lagi ada usaha-usaha khusus. Jadi, ada juga pendapat yang menganggap bahwa "Ah, sudah banyak kok program-program pemberdayaan perempuan. Buat apa lagi ada program baru yang memberdayakan perempuan?" Dalam kasus ini ada beberapa pendapat yang saling bertentangan satu sama lain di masyarakat, termasuk di kalangan pelaku filantropi sosial. *Ketiga*, dalam hal status dan peran, perempuan dianggap sudah maju dan setara dengan laki-laki sehingga tidak perlu diberikan perhatian secara khusus. Ada anggapan bahwa tidak ada faktor perbedaan gender di dalam filantropi sosial. Dengan kata lain, kita tidak perlu membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam konteks filantropi sosial.

Dilihat dari mulai signifikannya posisi dan peran kaum perempuan di sektor publik dan swasta, apakah potensi kedermawanan dari kaum perempuan di Indonesia cukup besar?

Saya tidak punya data yang pasti, tetapi bisa dipastikan bahwa potensi kedermawanan perempuan di Indonesia cukup besar. Indikatornya bisa dilihat dari perkembangan UKM,

misalnya. Usaha kecil-menengah di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan. Data mengenai perkembangan tersebut dapat diakses melalui Kementerian UKM atau BPS. Adanya fakta bahwa kebanyakan perempuan aktif berkiprah di UKM, menunjukkan bahwa mereka secara ekonomi mempunyai potensi untuk terlibat di dalam filantropi sosial. Keterlibatan perempuan tidak terbatas hanya pada UKM, namun juga kewiraswastaan besar. Sehingga *disposable income* (pendapatan lebih) mereka bisa membantu dalam gerakan filantropi.

Mengapa lembaga-lembaga sosial belum melirik potensi ini dengan merekrut mereka menjadi donatur atau pendukung program-program pemberdayaan perempuan?

Karena pada umumnya lembaga-lembaga sosial belum mengetahui dan menyadari bahwa potensi kaum perempuan cukup besar. Kebanyakan lembaga sosial masih melihat perempuan sebagai bagian dari rumah tangga. Peran dan posisi laki-laki yang lebih dilihat. Jadi ada asumsi yang belum tentu dibuktikan melalui data empiris bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki dan yang berkewajiban untuk mencari nafkah utama adalah laki-laki. Dalam ranah rumah tangga, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk berperan dalam kegiatan filantropi. Kenyataannya, *female headed household* atau perempuan kepala rumah tangga saat ini jumlahnya cenderung meningkat. Secara kultural, potensi perempuan sebagai donatur atau pendukung program perempuan belum diprioritaskan karena ideologi patriarki yang kuat mengakar di dalam masyarakat. Perubahan perspektif ini hanya terjadi jika ada perubahan di dalam struktur dan kultur masyarakat.

Mengapa para perempuan sendiri belum banyak menyadari problem-problem yang dihadapi kaumnya dan memberikan dukungan bagi upaya untuk mengatasi problem tersebut?

Karena secara struktural dan kultural sebagian besar kaum perempuan disosialisasikan untuk menerima ketidaksetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan di dalam masyarakat sebagai sesuatu yang lazim, wajar, dan normal. Belum banyak perempuan yang mempunyai perspektif gender. Mereka masih berpikir sama dengan kaum laki-laki bahwa perempuan hanya berperan di ranah domestik. Walaupun mereka beralih ke ranah publik, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang tinggi. Secara umum, perempuan tetap dianggap sebagai penunjang pasangannya, penunjang suaminya. Perempuan belum dianggap sebagai orang yang secara mandiri mempunyai nafkah sendiri dan bisa diminta membantu untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai aktivitas filantropi sosial. Kultur yang kuat tersebut mempengaruhi struktur. Akibatnya sebagian besar kaum perempuan belum menyadari berbagai problem yang dihadapi kaumnya dan bagaimana secara bersama-sama memberikan dukungan bagi upaya untuk mengatasi problem tersebut.

Pengambilan keputusan dalam menyumbang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Secara sosiologis, apakah kecenderungan ini juga berpengaruh terhadap minimnya keterlibatan dan dukungan pendanaan kaum perempuan bagi program-program sosial, khususnya program pemberdayaan perempuan?

Sesungguhnya keterlibatan dan dukungan pendanaan kaum perempuan untuk program-program sosial bagi kaum perempuan tidaklah minim. Cukup banyak organisasi perempuan dan perempuan secara individual yang sekarang ini telah terlibat dan mendukung pendanaan bagi program pemberdayaan sesama perempuan. Secara sosiologis pengambilan keputusan dalam menyumbang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap minimnya keterlibatan dan pendanaan kaum perempuan. Akan tetapi, sekarang cukup banyak kaum perempuan sebagai kepala rumah tangga ataupun yang masih lajang yang mempunyai penghasilan

mandiri. Sehingga mereka juga dapat mengambil keputusan untuk menyumbang secara mandiri. Walaupun seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kultur patriarki yang kuat masih sangat mempengaruhi pola masyarakat kita. Laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan kepala rumah tangga sehingga pengambilan keputusan lebih banyak berada di tangan suami daripada istri. Walaupun perempuan bekerja, masih ada anggapan umum bahwa dia hanyalah pelengkap pencari nafkah. Perempuan lebih banyak harus mendukung suaminya sebagai kepala rumah tangga.

Bagaimana mengatasi berbagai problematika tersebut?

Filantropi perlu menunjang program-program jangka panjang yang memenuhi kebutuhan strategis kaum perempuan dan bukan hanya program-program jangka pendek yang semata-mata memenuhi kebutuhan praktis kaum perempuan. Kebutuhan strategis jangka panjang tersebut dapat mulai dipenuhi dengan pertama-tama merubah struktur dan kultur masyarakat yang menyebabkan kaum perempuan dipinggirkan. Secara perlahan-lahan, upaya ini sudah mulai terjadi. Misalnya, di lapisan menengah ke atas dan di masyarakat perkotaan sudah ada pembagian peran dalam rumah tangga antara suami-istri, antara laki-laki-perempuan. Sudah ada laki-laki atau suami yang mau bekerja membantu istrinya di dalam rumah tangga. Sebaliknya seorang istri juga bisa mencari nafkah, sama dengan yang dilakukan suaminya. Sehingga kalau makin lama makin banyak rumah tangga yang terdiri dari pasangan yang berpendidikan tinggi dan dua-duanya bekerja. Maka pembagian tugas di dalam rumah tangga makin lama akan makin setara. Berdasarkan data di negara lain yang saya ketahui, semakin negara itu maju secara industrial atau mengalami proses industrialisasi, semakin banyak perempuan menjadi angkatan kerja di ranah publik. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga harus ada pembagian peran yang lebih setara. Karena kaum perempuan dapat meningkatkan *bargaining position*-nya di dalam rumah tangga kalau dia sendiri secara ekonomi juga mandiri.

Kedua, perlunya peningkatan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di dalam kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah baik di pusat maupun daerah. Ketiga, dunia usaha dapat mendukung berbagai kegiatan filantropi yang memenuhi kebutuhan strategis perempuan dalam jangka panjang.

Secara konkret PIRAC dan lembaga-lembaga lain yang melakukan upaya penguatan filantropi Indonesia bisa memfokuskan pada (1) Bagaimana melakukan *gender mainstreaming* di dalam filantropi sosial, (2) Bagaimana membuat filantropi sosial di kalangan kaum perempuan dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dua hal tersebut seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi bagaimana gerakan filantropi sosial mengarusutamakan persoalan perempuan, sebaliknya sekaligus gerakan filantropi sosial tersebut bisa lebih diterima.

Bagaimana peranan kaum perempuan dalam membantu organisasi-organisasi sosial mengatasi problematika yang dihadapi kaumnya lewat kegiatan filantropi?

Potensi kaum perempuan dalam menyumbang kegiatan perempuan cukup besar. Walaupun sebagian besar perempuan belum terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan filantropi. Alasan pertama, kegiatan filantropi sosial ini bukan suatu yang sudah lama ada di Indonesia. Tetapi kalau kegiatan filantropi tersebut diartikan sebagai kegiatan sosial pada umumnya dimana keluarga-keluarga memberikan sumbangan / donasi, kebiasaan ini sudah lama menjadi tradisi masyarakat kita. Filantropi diartikan bukan hanya memberikan atau menyumbangkan tenaga atau waktunya tetapi yang menyumbangkan pemikiran, dana. Dalam hal ini, kaum perempuan dapat melibatkan diri baik melalui kegiatan-kegiatan sukarela secara individual, maupun kelompok dan organisasi dengan menyumbangkan pemikiran, tenaga, waktu, dan dana sesuai dengan kemampuan pribadi maupun kelompok atau organisasi.

Menurut saya udah cukup banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan filantropi terutama mereka yang berada di lapisan menengah ke atas. Namun kondisi ini belum

menjadi kecenderungan umum, masih kasus. Misalnya, dahulu kita mengenal tokoh-tokoh perempuan seperti Dewi Sartika, Kartini yang berjuang untuk kepentingan perempuan pada waktu itu. Sekarang, di jaman yang lebih maju, kita mengenal Pia Alisyahbana, Tuti Alawiyah, dan tokoh perempuan lainnya yang dapat dijadikan *role model*. Mereka adalah tokoh-tokoh perempuan dan biasanya berasal dari keluarga tokoh-tokoh masyarakat.

Bagaimana membangun kesadaran kaum perempuan untuk peduli dan mendukung program yang bertujuan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dan mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya?

Membangun kesadaran untuk peduli dan mendukung program yang memperjuangkan kaum perempuan bukan hanya tugas kaum perempuan. Ini merupakan kesadaran seluruh anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan bangkitnya kesadaran kaum laki-laki dan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan, maka akan bermanfaat bukan hanya lagi kaum perempuan tetapi untuk seluruh masyarakat.

Upaya tersebut dapat dimulai dengan proses sosialisasi di rumah sebagai unsur terkecil dari pemerintahan. Proses sosialisasi di dalam keluarga ini penting dalam sosiologi. Jika proses sosialisasi dalam keluarga masih sulit, maka bisa masuk melalui jalur pendidikan formal. Peran pemerintah sangat strategis dalam menjembatani persoalan ini, misalnya, dalam menetapkan kurikulum pendidikan. Ketika proses sosialisasi di dalam keluarga masih bias gender, maka pemerintah dapat melakukan intervensi langsung dalam kurikulum; dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, tentu harus ada kerja sama antara Depdiknas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *gender mainstreaming* di dalam kurikulum pendidikan formal. Proses ini akan menjadi awal yang lebih baik jika perubahan nilai telah terjadi. Di lain pihak, organisasi masyarakat sipil (CSO) bersinergi dengan pemerintah untuk berupaya membuat makin lama makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan itu seharusnya setara. Hal ini bisa dan konkret untuk dilakukan.

Kalau di luar negeri ada gerakan “women vote women”, bisakah gerakan ini diadaptasi untuk menggerakkan filantropi perempuan lewat gerakan “women donate women”? Sejauh mana gerakan ini bisa diimplementasikan di Indonesia?

Gerakan “*women donate women*” pernah dimulai beberapa tahun lalu oleh Kelompok Perempuan Peduli Indonesia. Mereka mengadaptasikan gerakan serupa yang dilakukan oleh para anggota perempuan dari Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat. Gerakan ini dilakukan dalam rangka mendukung usaha pendanaan kegiatan kampanye dari para calon anggota perempuan kedua partai tersebut. Meskipun di Amerika Serikat mereka mempunyai dua gerakan yang terpisah tetapi di Indonesia diusahakan untuk ada satu gerakan bagi semua calon anggota perempuan tanpa melihat dari partai politik manapun. Meskipun demikian, harus diakui bahwa di dalam mengusahakan imlementasinya di Indonesia sekarang ini masih perlu cukup banyak kerja keras.

Contoh lainnya, gerakan “Pundi Perempuan” bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan dan LSM lainnya dan cukup banyak perempuan yang menyadari bahwa itu penting. Tetapi kendalanya, belum cukup banyak laki-laki dan perempuan di luar sekelompok perempuan ini yang melihat pentingnya untuk memilih perempuan. Jika orang belum bisa melihat pentingnya memilih buat perempuan, dia pasti tidak mau menyumbang. Persoalan memilih perempuan belum dianggap penting, bukanlah persoalan kultur semata, tetapi juga bagaimana membuktikan bahwa perempuan bisa lebih baik dari laki-laki jika berkuasa. Dengan kata lain, cukup banyak orang yang masih membutuhkan, termasuk kaum perempuan sendiri, pembuktian tersebut. Sehingga banyak kaum perempuan yang juga menganggap, “Kenapa harus memilih perempuan?” Pandangan tersebut masih kuat, sehingga ketika perempuan diminta mendukung gerakan perempuan, misalnya dengan mengumpulkan uang, mereka masih berpikir sekian kali.

Menurut pendapat Ibu, bagaimana gerakan filantropi sosial, khususnya yang didedikasikan untuk pemberdayaan perempuan, dapat diterima oleh masyarakat?

Masyarakat kita sekarang, di saat ekonomi memburuk, melihat filantropi sebagai suatu kemewahan. Sebagian orang masih menganggap bahwa yang bisa menjadi dermawan hanya orang-orang yang mampu padahal sebenarnya tidak. Filantropi bisa dimaknai secara luas. Orang bisa menyumbang tenaga, pikiran, atau waktu, tidak perlu harus dana. Tetapi kalau kita berbicara tentang filantropi, kebanyakan asosiasi orang adalah uang. Perspektif ini yang harus dibenahi. Ini merupakan tantangan bahwa filantropi bukanlah gerakan orang kaya untuk orang miskin. Filantropi bisa dilakukan oleh semua orang, tidak perlu kaya dan bahkan tidak hanya untuk orang miskin.

Gerakan filantropi, menurut saya, adalah gerakan yang lebih mengikat integrasi sosial dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Kita harus mengembalikan filantropi secara kultural dikaitkan dengan tradisi gotong royong di dalam masyarakat kita. Karena tradisi gotong royong tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Di dalam tradisi etnis maupun di Indonesia, gotong royong memiliki bentuk mulai yang paling formal sampai yang paling informal. Sehingga jika mau melakukan filantropi modern atau “kontemporer”, diharapkan tidak terjebak ke dalam isu gender. Itu yang saya maksud *me-mainstream* gender di dalam gerakan filantropi. Dan jika mau memperluas gerakan filantropi dengan menggaet sebanyak mungkin kaum perempuan, perlu dipertimbangkan kembali selain maknanya bukan sekadar memberi uang. Tetapi juga kembali ke tradisi dimana masyarakat kita mengikat integrasi dan solidaritas sosial tanpa melihat perbedaan gender. Pada jangka panjang, lebih baik isu gender jarang menjadi khusus filantropi dan perempuan. Tapi isu gender di-*mainstream* di dalam gerakan filantropi.